



## Disebut Bodoh, Dewan Bergejolak

### DPRD Disarankan Laporkan Penghinaan kepada Kepolisian

**SUASANA** gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat bergejolak. Hal tersebut imbas dari komentar tudingan penghinaan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut anggota dewan yang terhormat sebagai orang bodoh.

Merekapun ramai-ramai mengancam pernyataan orang nomor satu di Ibu Kota itu. "Kami pikir tidak pantas seorang gubernur melontarkan kata-kata penghinaan seperti itu. Ahok kami harapkan segera mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada dewan," ujar Taufik Hadiawan, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, kemarin (3/8) ■

Taufik menilai, Ahok sudah keterlaluhan dan tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Dia khawatir, di tengah masyarakat akan muncul gejala yang menganggap kondisi kejiwaan Ahok terganggu karena sering berkata di luar kontrol.

"Mereka akan meragukan kondisi kesehatan jiwa gubernur sebagai pemimpin mereka. Sebab, gubernur kerap bertingkat di luar kewajaran," cetusnya juga.

Senada juga diungkap Ketua Fraksi PPP, Maman Firman-syah. Menurut Maman, bukan kali ini saja Ahok berkata tak pantas. Sebelumnya Ahok juga mengucap kata-kata isi toilet saat diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi swasta. "Saya kira gubernur kita ini

sudah sangat kebablasan," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Accountability (Infra), Agus Chairuddin, menyarankan DPRD DKI Jakarta melaporkan Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok itu ke aparat penegak hukum untuk memberikan pembelajaran. DPRD DKI harus melaporkan Ahok atas tuduhan penghinaan.

Pernyataan Ahok yang menyebut bodoh DPRD, jika memanggil dirinya untuk dimintai penjelasan mengenai proyek

UPS (*uninterruptible power supply*), sebut Agus Chairuddin, merupakan penghinaan terhadap lembaga negara. Sesuai dengan hukum, penghinaan yang dilakukan Ahok itu dapat dipidanakan.

"DPRD harus realistis, jangan cuma beretorika. Laporkan segera Ahok ke penegak hukum," katanya.

Menurut dia juga, DPRD DKI tidak bisa membiarkan sikap Ahok tersebut. Melaporkan Ahok yang bukan kali ini saja bersikap arogan dan melecehkan institusi negara ke penegak hukum tak lain adalah bentuk sikap tegas DPRD.

Sebelumnya, Ahok juga menistakan BPK RI karena memberikan rapor merah terhadap laporan keuangan APBD DKI tahun 2014. "Ketua DPRD saudara Prasetio Edi dan Pimpinan DPRD harus melaporkan Ahok ke penegak hukum," tukasnya.

Seperti diketahui, terkait dugaan korupsi UPS, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama secara terang-terangan mengatakan, para oknum anggota dewan di DPRD DKI Jakarta bodoh. Mereka hendak

mempermainkan anggaran, tetapi tak mengerti cara yang harus mereka lakukan agar permainan itu sukar dideteksi.

Ahok juga mengatakan tindakan DPRD DKI yang akan memanggilnya untuk dimintai keterangan terkait kasus UPS karena dia diperiksa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengadagada. Lan-taran, Ahok mengaku dia yang sebelumnya melaporkan kasus itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu kasusnya diambil alih oleh kepo- penjelasan mengenai proyek

"Ini DPRD juga sebagian besar bodoh-bodoh saya bilang," ujar Ahok beberapa hari lalu yang diliput media elektronik dan media cetak. Untuk diketahu, Bareskrim Mabes Polri sendiri, saat ini tengah menyidik kasus korupsi dalam peng- anggaran pengadaan perangkat UPS yang dengan anggaran Rp330 miliar.

Penganggaran tersebut tertantum dalam anggaran Dinas Pendidikan pada APBDP DKI tahun 2014.

Padahal, Ahok mengatakan, dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang merupakan rancangan APBD Perubahan di pertengahan tahun 2014, DKI tidak mencantumkan satupun peng- anggaran prioritas untuk bi- dara Prasetio Edi dan Pimpinan dang pendidikan termasuk proyek UPS.

Hal ini dikarenakan pengang- garan utama di bidang pendid- dikan, yaitu pendanaan untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah tuntas dicantumkan dalam APBD tahun 2014. "Tidak perlu lagi ada biaya untuk pro- gram pendidikan karena KJP sudah jalan," terang mantan Bupati Belitung Timur tersebut. (wok)





Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### Pernyataan Kontroversial Ahok



**19 Maret 2015**  
 Dalam siaran langsung salah satu televisi nasional, Ahok mengeluarkan bahasa toilet yang tidak pantas.

---

**11 April 2015**  
 Ahok menyebut Kemendagri bodoh dan tidak paham UU karena hanya menyetujui penggunaan pagu anggaran APBD DKI 2015 senilai Rp 69,2 triliun.

---

**7 Juli 2015**  
 Ahok marah kepada BPK RI yang memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait hasil audit APBD 2014.

---

**31 Juli 2015**  
 Ahok menyebut oknum DPRD DKI bodoh karena tidak lihai dalam mengatur strategi memainkan anggaran.

ANGGA GUMELAR/INDOPOS

### Pernyataan Kontroversial Ahok

Bersambung ke halaman 12.



**17 Mei 2015**  
 Ahok menantang Komnas HAM yang akan menyeretnya karena mengusir warga yang tinggal di Waduk Pluit.

---

**27 September 2013**  
 Ahok juga pernah mengkritik Menteri Dalam Negeri kala itu, Gamawan Fauzi, terkait jabatan Lurah Lenteng Agung, Susan.

---

**9 Februari 2013**  
 Ahok menuduh PLN sebagai penyebab banjir Jakarta lantaran mematikan listrik penyedot air di Waduk Pluit.

**25 Juli 2013**  
 Saat masih menjabat Wagub DKI, Ahok menyebut ada mafia politis di balik membandelnya para PKL di Tanah Abang yang tidak mau direlokasi.

---

**3 Februari 2014**  
 Ahok menyebut Kampung Pulo akan banjir hingga kiamat sebab warga sulit direlokasi ke rusun.

---

**24 April 2014**  
 Saat ramai wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, Ahok mengeluarkan pernyataan kalau kepala daerah dipilih DPRD sama saja jadi sapi perah dewan.

ANGGA GUMELAR/INDOPOS